

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua kegiatan manusia mempunyai dampak terhadap lingkungannya. Kegiatan hayati seperti pembuangan sisa metabolisme dalam bentuk air seni dan tinja berdampak pada lingkungan hidup. Dampak itu semakin besar dengan berkembangnya kegiatan ekonomi dan penggunaan teknologi yang memberikan kepada manusia kemampuan untuk melakukan rekayasa dan eksploitasi sumber energi.¹ Dalam prosesnya, pengelolaan lingkungan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah akan tetapi peran masyarakat ikut serta dalam mensukseskan agenda tersebut. Walaupun demikian, adanya peran pemerintah itu sebagai alat penataan dan pengaturan terhadap manusia sebagai pelaku lingkungan.

Sejarah mencatat kedatangan bangsa Eropa turut andil dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, maupun politik. Pengaruh kedatangan bangsa Eropa terhadap Nusantara pada awal abad 16 masih sangat terbatas, baik dari segi daerah yang dipengaruhi maupun kedalaman pengaruh itu sendiri. Meskipun orang-orang Eropa terutama orang Belanda memiliki dampak yang besar terhadap Nusantara (Indonesia), namun hal itu pada dasarnya merupakan fenomena dari masa-masa kemudian.² Permulaan abad 20, kebijakan kolonial Belanda mengalami perubahan arah yang paling mendasar dalam sejarahnya. Kekuasaannya memperoleh definisi kewilayahan baru dengan selesainya upaya-upaya penaklukan yang dilakukan sebelumnya. Kebijakan kolonial Belanda

¹ Mundiayatun & Daryanto, *Pengelolaan Kesehatan Lingkungan*. (Yogyakarta : Gava Media, 2015), hlm, 13

² M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. (Jakarta : Serambi, 2007), hlm 61.

tersebut kini juga memiliki tujuan baru. Eksploitasi terhadap Indonesia mulai kurang dijadikan sebagai alasan utama kekuasaan Belanda, dan digantikan dengan pernyataan-pernyataan keprihatinan atas kesejahteraan bangsa Indonesia. Kebijakan tersebut dinamakan politik etis,³ politik ini berakar pada masalah kemanusiaan dan sekaligus pada keuntungan ekonomi.⁴

Dalam perkembangannya, terjadi perubahan sejak VOC memonopoli aktivitas perdagangan di sektor maritim termasuk pantai Cirebon. Pihak VOC lebih mementingkan kegiatan ekonomi dari pada kebersihan dan kesehatan. Akibatnya, kebersihan pantai Cirebon kurang mendapatkan perhatian yang serius. Lingkungan menjadi kotor, kumuh dan menyebarkan bau busuk. Jalanan dibiarkan rusak dan berlubang.⁵

Pada tanggal 1 April 1906 berdasarkan *staatsblad* 1906 No. 122 dan sejalan dengan hasil perjuangan warga kota untuk memperoleh otoritas lokal dan perwakilan, maka Cirebon berubah menjadi *Gemeente* (Kotamadia) dengan memakai sistem desentralistik.⁶ Beberapa tahun sebelumnya, isu tentang kondisi lingkungan perkotaan dijadikan tuntutan

³ Politik balas budi. Lihat M.C Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004*, Jakarta : Serambi, 2007, hlm, 319.

⁴ Agus Susilo, *Politik Etis Dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia*, Jurnal Historia, Vol, 6, No, 2, 2018. hlm. 404 (diunduh dari <http://ojs.fkip.ummetro.ac.id/index.php/sejarah/article/download/1531/pdf> pada tanggal 29) Oktober pukul 20.00 WIB)

⁵ Imas Emalia, *Wabah Penyakit dan Penanganannya di Cirebon 1906-1940*, Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2020, hlm, 17.

⁶ Hingga permulaan abad XX Pemerintah Kolonial terkenal dengan sistem sentralisasinya yang ekstrim, biroksasinya yang kaku dan otokrasinya yang mutlak karena seluruh jalannya pemerintahan ditentukan oleh menteri jajahan dan pusat pemerintahan ada di Netherland. Tidak ada badan politik satupun yang menjadi alat penyalur suara rakyat. Sejumlah pegawai belanda ditempatkan pada unit-unit pemerintahan pada berbagai tingkatan, yaitu dari karesidenan hingga ke distrik. Mereka itu memegang jabatan penasehat merangkap pengawas dari pejabat-pejabat pribumi. Lihat Zaenal Masduqi, *Cirebon dari Kota Tradisional ke Kota Kolonial*, (Cirebon : Nurjati Press, 2011), hlm, 52.

oleh orang-orang Belanda (*nederlandsche burgerij*) penghuni kota-kota di Hindia Belanda, di Belanda muncul tuntutan agar mereka diberi “hak bicara” (*medezeggenschap*) dalam proses-proses pembuatan kebijakan di bidang pemerintahan. Inti dari tuntutan tersebut adalah bahwa daerah sudah semestinya diberi otoritas yang cukup besar untuk mengelola diri sendiri secara mandiri, tidak tergantung pada pemerintah pusat di Batavia. Dengan adanya hak untuk mengelola daerah, maka diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam mengembangkan diri. Pembangunan bisa digenjut, sehingga problem-problem di daerah bisa diselesaikan dengan cepat. Salah satu problem di daerah terutama di perkotaan, adalah buruknya kondisi lingkungan pemukiman untuk hunian rakyat bumiputra. Pemukiman-pemukiman nyaris tidak diurus dengan baik, sehingga di banyak tempat berdiri rumah-rumah yang lebih mirip kandang binatang dibandingkan sebagai tempat tinggal manusia.⁷

Jauh sebelumnya, dalam catatan Douglas pelancong asal Belanda ia memberitakan perubahan kondisi lingkungan tidak serta merta akibat aktivitas VOC yang jorok dan mengabaikan kebersihan lingkungan melainkan faktor alam turut berperan di dalamnya. Tercatat letusan Gunung Ciremai di daerah Kuningan pada tahun 1772 dan 1805. Dampaknya sangat serius, terjadi kerusakan yang parah serta menurunnya drajat kesehatan masyarakat.⁸

Pada akhir abad ke-19 pemerintah Hindia Belanda mulai melakukan pembenahan dan penataan kota secara lebih baik, dan pada awal abad ke-20 seiring dengan berubah status Kota Cirebon menjadi kota

⁷ Purnawan Basundoro, *Politik Rakyat Kampung Di Kota Surabaya Awal Abad Ke-20*. Gadjah Mada: Journal Of Humanities, Vol, 1, No, 1, 2016. (diunduh dari <https://jurnal.ugm.ac.id/sasdayajournal/article/download/17025/11170> pada tanggal 31 Oktober 2020 pada pukul 21.00 WIB)

⁸ Imas Emalia, *Op,Cit.*, hlm, 17-18.

praja (*Gemeente*) maka dibuat perencanaan kota secara lebih profesional. Adanya permasalahan sanitasi, kebersihan, sampah, wabah penyakit dan drainase di Kota Cirebon pada akhir abad ke-19, akhirnya juga mendorong upaya-upaya awal penataan kota yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut.⁹

Di antara upaya untuk menjadikan Kota Cirebon yang sehat dan pencegahan terhadap berbagai macam penyakit telah dilakukan sejak tahun 1908 dengan pembersihan kampung-kampung, menimbun pembuangan kotoran, penguburan dan pembersihan jalannya selokan dan parit, peletakan bak-bak sampah di setiap kampung.¹⁰ Diberitakan pula oleh Dr. E.C.Godee Molsbergen (Petugas Arsip Negara Hindia Belanda) dalam *Uit Cheribon's Geschiedenis* upaya pemerintah guna menjaga kebersihan lingkungan dilakukannya pengangkutan sampah rumah tangga dan halaman, juga penyemprotan jalan-jalan. Pemeliharaan kebersihan selokan dan saluran pembuangan air dilakukan oleh petugas kotamadya / kotapraja.¹¹

Permasalahan kesehatan lingkungan menjadi salah satu sektor yang disoroti oleh pemerintah *Gemeente* Cirebon. Hal ini dilakukan guna menjadikan Cirebon sebagai kota dengan citra yang lebih baik. Berangkat dari uraian di atas, penulis ingin mengetahui lebih mendalam terkait permasalahan kesehatan, khususnya sanitasi lingkungan dan upaya yang dilakukan pemerintah. Oleh sebab itu, dalam upaya penyusunan skripsi ini, penulis akan mengangkat topik terkait ***“Penerapan dan Implikasi***

⁹ Eko Punto Hendro, *Perkembangan Morfologi Kota Cirebon Dari Masa Kerajaan Hingga Masa Kolonial* Semarang: Jurnal Paramita, 2014, Vol.24, No.1, (diunduh dari <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/paramita/article/view/2861> pada tanggal 5 April 2020 pada pukul 13.00 WIB) hlm 26

¹⁰ Zaenal Masduqi, *Cirebon dari Kota Tradisional ke Kota Kolonial*, (Cirebon : Nurjati Press, 2011), hlm, 106.

¹¹ E. C. Godee Molsbergen, *Uit Cheribon's Geschiedenis* (Sekelumit Sejarah Cirebon), terj. Iwan Satibi, Majalengka, hlm. 28.

Kebijakan Pemerintah Gemeente Cirebon dalam Menangani Sanitasi Lingkungan Tahun 1906-1942

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut permasalahan yang akan dikelupas ialah mengenai upaya pemerintah *Gemeente* Cirebon dalam menangani persoalan sanitasi lingkungan. Dari pertanyaan pokok melahirkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan pemerintah *Gemeente* Cirebon dalam menangani sanitasi lingkungan?
2. Bagaimana penerapan kebijakan pemerintah *Gemeente* Cirebon dalam menangani sanitasi lingkungan?
3. Bagaimana implikasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah *Gemeente* Cirebon dalam menangani sanitasi lingkungan?

C. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya di era *Gemeente* Cirebon 1906-1942. Tahun 1906 sebagai awal disahkannya Cirebon sebagai Kotapraja. Ketika berstatus menjadi Kotapraja maka pemerintah Kota Cirebon memiliki wewenang (hak istimewa) untuk menentukan kebijakan pajak sendiri, mengembangkan dan mengelola infrastruktur kota dan mengelola keuangan sendiri. Salah satu permasalahan yang disoroti pemerintah adalah citra Kota Cirebon.

Tahun 1942 sebagai penanda berakhirnya pemerintahan *Gemeente* Cirebon. Dalam periode tersebut, penulis ingin lebih mengetahui produk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah *Gemeente* Cirebon dalam hal ini adalah masalah sanitasi lingkungan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Melihat dari rumusan masalah yang dicetuskan, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah *Gemeente* Cirebon dalam menangani sanitasi lingkungan.
2. Untuk mengetahui penerapan kebijakan pemerintah *Gemeente* Cirebon dalam menangani sanitasi lingkungan.
3. Untuk mengetahui implikasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah *Gemeente* Cirebon dalam menangani sanitasi lingkungan.

Sedangkan Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, umumnya pada masyarakat Cirebon. Memberikan manfaat bagi Institut Agama Islam Negeri, khususnya pada Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Memberikan sumbangan terhadap perkembangan penulisan rekonstruksi sejarah Cirebon pada awal abad ke-20, dan dapat menjadi masukan bagi peneliti dimasa yang akan datang mengenai kajian lokal.

E. Tinjauan Pustaka/Kajian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan telaah terhadap suatu literatur yang telah dijadikan sebagai landasan pemikiran dalam sebuah penulisan karya ilmiah. Penulisan karya sejarah ataupun penulisan sejarah selalu berdampingan dengan penggunaan literatur-literatur guna mendukung fakta-fakta yang akan disampaikan oleh penulis. Sejauh penulis menyusun skripsi, sangat minim sekali ditemukan penelitian yang secara eksplisit membahas tentang sanitasi lingkungan di Kota Cirebon era *Gemeente*. Adapun kajian terdahulu yang berkaitan dengan sanitasi lingkungan adalah sebagai berikut :

1. Jurnal dari Imas Emalia yang berjudul "*Wabah Tifus di Cirebon Masa Hindia Belanda: Kebijakan Pemerintah dan Solusi Sehat Masyarakat*" yang diterbitkan dari Jurnal Sejarah Masyarakat Sejarah Indonesia Vol. 3(1), 2020: 111 – 115 dalam artikel ini membabarkan kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam menangani kasus wabah tifus di Cirebon dan membahas solusi pemerintah terhadap kesehatan masyarakat. Persamaan kajian dalam artikel tersebut dengan penulis ialah pemilihan tema yakni kesehatan. Perbedaan yang signifikan antara artikel dan penulis adalah fokus kajian dan ruang lingkungannya.
2. Laporan dari Dhanang respati Puguh yang berjudul "Dari "*Per Aspera Ad Astra*" ke "Cirebon Baru" Perubahan Citra Kota Cirebon 1930-1950-an. Yang dikeluarkan oleh FIB UNDIP membabarkan gambaran Cirebon pada abad XIX merupakan kota yang jorok, becek dan dilecehkan. Sampai abad XX citra ini belum berubah. Yang membedakan laporan ini dengan penulis adalah fokus kajiannya. Dalam laporan ini difokuskan pada wajah dan citra Kota Cirebon masa *gemeente* dan pembentukan identitas dan citra baru Kota Cirebon pada awal kemerdekaan Indonesia. sedangkan penulis lebih menekankan pada kebijakan pemerintah *gemeente* Cirebon dalam menangani permasalahan sanitasi lingkungan.
3. Skripsi dari Frial Ramadan Supratman yang berjudul "*Menuju kota sehat: Usaha meningkatkan kualitas kesehatan di Kota Cirebon pada masa kolonial 1915-1942*" yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, pada tahun 2013. Pada skripsi

tersebut diterangkan problem kesehatan, terutama wabah penyakit malaria dan pes. Kebijakan pemerintah dalam menangani wabah tersebut serta kebiasaan masyarakat yang kurang menerapkan pola hidup sehat. Perbedaan antara skripsi tersebut dengan penulis adalah fokus kajiannya, penulis lebih memfokuskan pada masalah sanitasi lingkungan. Sedangkan persamaan skripsi tersebut dengan penulis ialah tema kajian dan wilayah kajian.

4. Skripsi dari Nunuy Nurhamidah yang berjudul *“Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda Tentang Kesehatan Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Kota Cirebon Pada Tahun 1800-1942”*. Yang diterbitkan oleh Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Skripsi tersebut membahas peran pemerintah Hindia Belanda dalam mengambil kebijakan di bidang kesehatan dan dampaknya bagi masyarakat Cirebon. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam kesehatan, mulai dari pembentukan organisasi kesehatan, diadakannya pendidikan kesehatan, sampai pendirian sebuah rumah sakit sebagai dampak dari adanya kebijakan tersebut. Tidak dipungkiri ada beberapa pembahasan tentang sanitasi lingkungan yang ditimbulkan dalam skripsi tersebut. Namun tidak semua pembahasan tentang sanitasi lingkungan ditimbulkan. Walaupun demikian, yang signifikan membedakan skripsi tersebut dengan penulis adalah fokus kajiannya. Skripsi tersebut fokus mengkaji tentang produk kebijakan pemerintah Hindia Belanda tentang kesehatan dan dampaknya bagi

masyarakat Cirebon, sedangkan penulis lebih memfokuskan kebijakan pemerintah gemeente Cirebon dalam menangani sanitasi lingkungan beserta penerapan dan implikasinya.

5. Skripsi dari Ahmad Taufal Marom yang berjudul "*Kebijakan Pemerintah Kolonial Terhadap Wabah Kolera di Cirebon Tahun 1805-1921*". Yang diterbitkan oleh Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. dalam skripsi tersebut membahas mengenai persebaran wabah kolera dan dampaknya bagi masyarakat Cirebon serta kebijakan pemerintah kolonial yang diterapkan dalam menangani wabah kolera. Persamaan skripsi tersebut dengan penulis ialah pemilihan tema yang diangkat. Perbedaan skripsi tersebut dengan penulis adalah fokus kajiannya. Dalam skripsi tersebut lebih fokus membahas mengenai wabah kolera dan dampaknya bagi masyarakat Cirebon serta kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial dalam menangani wabah kolera. Sedangkan penulis fokus membahas penerapan dan implikasi kebijakan pemerintah *Gemeente* Cirebon dalam menangani sanitasi lingkungan.

F. Landasan Teori

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan historis untuk menggali peristiwa masa lampau. Teori merupakan sekumpulan konsep, definisi dan profesi yang saling berkaitan yang menghadirkan suatu tujuan secara sistematis atas fenomena yang ada dengan menunjukkan secara spesifik hubungan-hubungan di antara variabel-variabel yang terkait dengan fenomena, dalam hal ini fenomena sejarah.¹² Terkait topik yang diangkat oleh penulis ***“Penerapan dan Implikasi Kebijakan Pemerintah Gemeente Cirebon dalam Menangani Sanitasi Lingkungan Tahun 1906-1942”*** ada beberapa teori atau konsep yang bisa digunakan :

1. Kebijakan

Menurut Ealau dan Pewit kebijakan adalah *“Sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuat maupun yang melaksanakan kebijakan tersebut”*. Menurut Titmuss Mendefinisikan kebijakan sebagai *“prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu”*. Sedangkan menurut Edi Suharto kebijakan adalah *“Suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu”*.¹³ Setidaknya ada dua poin akibat adanya suatu penetapan kebijakan *pertama*, kebijakan yang berorientasi kepada pelayanan publik. *Kedua*, kebijakan yang menciderai publik/kebijakan yang ditetapkan untuk diri sendiri atau hanya beberapa kalangan saja. Secara konseptual, setiap

¹² Saefur Rachmat, *Ilmu Sejarah dalam Perspektif Dengan Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009). hlm.102

¹³ Uddin B. Sore & Sobirin, *Kebijakan Publik*, (Makasar : CV Sah Media, 2017), hlm, 3

kebijakan publik selalu berorientasi pada kepentingan publik. Dengan demikian yang membedakan secara esensial antara kebijakan publik dan kebijakan non publik terletak pada muatan kepentingan publik yang harus tercermin pada setiap kebijakan publik.¹⁴

Perumusan kebijakan publik merupakan tahap awal dari keseluruhan proses kebijakan publik. Perumusan kebijakan publik bukanlah merupakan sebuah proses yang sederhana karena terdapat banyak faktor atau kekuatan yang berpengaruh dalam prosesnya. Dennis J. Palumbo mengajukan beberapa langkah-langkah dalam perumusan kebijakan publik adalah sebagai berikut:

- a. *Agenda setting*
- b. *Problem definition*
- c. *Policy design*
- d. *Policy legitimation*

Agenda setting dimaksudkan sebagai proses penyusunan isu-isu kebijakan yang telah diproyeksikan dan dinilai yang harus ditangani guna menjawab desakan publik. *Problem definition*, pada tahap ini isu permasalahan yang telah diagendakan dibahas kembali untuk menentukan tindakan selanjutnya, dan pemilihan tindakan tersebut harus dilakukan dengan cermat karena akan berpengaruh pada masa yang akan datang. *Policy design*, yaitu suatu kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah. *Policy legitimation* adalah proses pengesahan kebijakan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.¹⁵

¹⁴ Siti Rochmah, *Kebijakan Pelayanan*, (Malang : UB Press, 2013), hlm, 1

¹⁵ *Ibid*, hlm, 6-8.

Demikian pula dengan pemerintah Hindia Belanda, memasuki abad ke-20 politik etis Hindia Belanda mulai berlaku dengan semboyan kemajuan/perkembangan. Tentu saja kebijakan kolonial memiliki arah tujuan yang baru. Bersamaan dengan berjalannya sistem desentralisasi maka banyak kota di Pulau Jawa yang beralih status. Tak terlepas juga dengan kota Cirebon. Perubahan status tersebut tentunya berdasarkan beberapa faktor di antaranya adalah faktor kondisi setempat.

Berkaitan dengan teori kebijakan yang telah dipaparkan di atas, Pemerintah Hindia Belanda sebagai pemangku kebijakan kala itu, banyak produk kebijakan yang dikeluarkan guna mengatur, mengorganisir, demi tercapai suatu tujuan dalam hal ini adalah kebijakan dalam sektor kesehatan, sanitasi lingkungan.

2. Sanitasi lingkungan

Sanitasi menurut kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai pemelihara kesehatan. Menurut WHO, sanitasi adalah upaya pengendalian semua faktor lingkungan fisik manusia, yang mungkin menimbulkan atau dapat menimbulkan hal-hal yang merugikan, bagi perkembangan fisik, kesehatan, dan daya tahan hidup manusia. dalam penerapannya di masyarakat.¹⁶ Sanitasi lingkungan juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan dan mempertahankan standar kondisi lingkungan yang mendasar yang mempengaruhi kesejahteraan manusia. Kondisi tersebut mencakup:

- a. Pasokan air yang bersih dan aman
 - Jarak antara sumur dan septik tank minimum 10 m

¹⁶ Mundiayaton & Daryanto, *Pengelolaan Kesehatan Lingkungan*. (Yogyakarta : Gava Media, 2015), hlm, 18.

- Sumur harus diberi mulut dan kedap air dari permukaan tanah.
- b. Pembuangan limbah dari manusia, hewan dan industri yang efisien
 - Ada saluran pembuangan dari kamar mandi, air cucian pakaian dan peralatan dapur.
 - Tidak mencemari tanah dan air.
 - Tidak menimbulkan bau dan menyebabkan kecelakaan.
- c. Perlindungan makanan dari kontaminasi biologis dan klinis
 - Berada pada derajat kematangan yang dikehendaki.
 - Bebas dari pencemaran di setiap tahapan produksi dan penanganan selanjutnya.
 - Bebas dari perubahan fisik.
 - Bebas dari mikroorganisme dan parasite.
- d. Udara yang bersih dan aman
 - Gas H₂S dan NH₃ secara biologis tidak terdeteksi.
 - Gas SO₂ maksimum 0,10 ppm.
 - Debu maksimum 350 mm³/m² per hari
- e. Rumah yang bersih dan aman

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan No. 829/Menkes/SK/VII/1999 meliputi parameter sebagai berikut :

- Lokasi tidak terletak pada daerah rawan bencana.
- Tidak terletak pada daerah bekas pembuangan sampah.

- Tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan.
- Kualitas udara dan struktur tanah yang baik.

Pengaruh buruk dari lingkungan sebenarnya dapat dicegah dengan mengembangkan kebiasaan hidup sehat dan menciptakan sanitasi lingkungan yang baik. Kebiasaan hidup sehat dilakukan dalam berbagai cara seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan rumah dan halaman secara rutin, membersihkan kamar mandi dan bak mandi secara rutin dan sebagainya. Kegiatan tersebut dapat memutus siklus perkembangbiakan berbagai jenis organisme pembawa penyakit.¹⁷

Berdasarkan *staatsblad* No. 122 tahun 1906 Cirebon resmi menjadi *gemeente* (kotapraja). Dengan berubahnya status Kota Cirebon menjadi Kotapraja tentu berdampak signifikan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat mulai teratur dan tertata. Program demi program guna merubah citra Kota Cirebon supaya lebih teratur dan bersih mulai dijalankan. Hal ini bisa dijumpai dalam berbagai bidang di antaranya bidang transportasi dan penerangan jalan, dan bidang kesehatan yang meliputi sanitasi lingkungan.

¹⁷ Mundiatur & Daryanto, *Sanitasi Lingkungan : Pendidikan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta : Gava Media, 2018), hlm, 182-183.

G. Metodologi Penelitian

Dalam sebuah penelitian sejarah, terdapat empat tahapan yaitu pengumpulan data (heuristik), verifikasi (kritik data), interpretasi (penafsiran) dan historiografi (penulisan).¹⁸ Karena metode dalam studi sejarah, merupakan seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber secara sistematis.¹⁹

1. Pengumpulan Data (Heuristik)

Heuristik merupakan langkah awal dalam penelitian sejarah untuk berburu dan mengumpulkan berbagai sumber data yang terkait dengan masalah yang diteliti.²⁰ Dengan memasuki tahap pengumpulan sumber atau data (*heuristik*) seorang peneliti sejarah memasuki lapangan (medan) penelitian. Kerja penelitian secara aktual dimulai. Di lapangan ini kemampuan teoritis yang bersifat deduktif-spekulatif sebagai tertuang dalam proposal atau rancangan penelitian akan diuji secara induktif empirik atau pragmatik.²¹

Dalam pencarian sumber penulis melakukan langkah-langkah heuristik yaitu dengan mencari sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang berkaitan dengan topik penulis yaitu : arsip Belanda seperti *Uit Cheribon's Geschiedenis* oleh Dr. E.C. Godee Molsberger. Sedangkan sumber sekunder yang berkaitan dengan topik penulis yaitu buku-buku seperti *Cirebon dari Kota*

¹⁸Abd Rahman Hamid, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), hlm, 43.

¹⁹*Ibid*, hlm: 42.

²⁰Anwar Sanusi, *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Cirebon : Syekh Nurjati Press, 2013), hlm 138.

²¹A Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), hlm 51.

Tradisional ke Kota Kolonial, Bertahan di Tengah Krisis Komunitas Tionghoa dan Ekonomi Kota Cirebon, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, Wabah Penyakit dan Penanganannya di Cirebon 1906-1940.

2. Verifikasi (kritik sumber)

Tahapan selanjutnya yaitu verifikasi atau kritik sumber. Secara etimologis kata kritik berasal dari Bahasa Yunani yang berarti menghakimi, membandingkan atau menimbang.²² Kritik sumber yaitu upaya untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber.²³ Kritik merupakan kemampuan menilai sumber-sumber sejarah yang telah dicari (ditemukan). Kritik sumber sejarah meliputi kritik ekstern dan kritik intern.

Kritik ekstern di dalam penelitian ilmu sejarah umumnya menyangkut keaslian atau keautentikan bahan yang digunakan dalam pembuatan sumber sejarah seperti prasasti, dokumen dan naskah. Bentuk penelitian yang dapat dilakukan sejarawan misalnya tentang waktu pembuatan dokumen itu (hari dan tanggal) atau penelitian tentang bahan (materi) pembuatan Dokumen itu sendiri. Sejarawan dapat juga melakukan kritik ekstern dengan menyelidiki tinta untuk penulisan dokumen guna menemukan usia dokumen.

Kritik intern merupakan penilaian keakuratan atau ke autentik terhadap materi sumber sejarah itu sendiri. Di dalam proses analisis terhadap suatu dokumen sejarawan harus selalu memikirkan unsur-unsur yang relevan di dalam dokumen itu

²² Aditia Muara Padiatra, *Ilmu Sejarah Metode dan Praktik*, (Gresik : Jendela sastra Indonesia Press, 2020), hlm, 62.

²³ Suhartono W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm, 35.

sendiri secara menyeluruh. Unsur dalam dokumen dianggap relevan apabila unsur tersebut paling dekat dengan apa yang telah terjadi, sejauh dapat diketahui berdasarkan suatu penyelidikan kritis terhadap sumber-sumber terbaik yang ada.²⁴

3. Interpretasi (Penafsiran)

Proses perjalanan penelitian sejarah yang bermuara pada metode sejarah dengan empat tahap, heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi, pada hakikatnya berpuncak pada tahap interpretasi. Heuristik dan kritik berfungsi untuk menyeleksi sumber-sumber atau data-data sejarah, sehingga didapatkan fakta-fakta atau bukti-bukti sejarah yang valid dan reliable.

Interpretasi berarti menafsirkan atau memberi makna kepada fakta-fakta atau bukti-bukti sejarah. Mengapa harus diinterpretasi? Interpretasi diperlukan karena pada dasarnya bukti-bukti sejarah sebagai saksi relitas di masa lampau adalah hanya saksi-saksi bisu belaka. Fakta-fakta atau bukti-bukti dan saksi-saksi sejarah itu tidak bisa berbicara sendiri mengenai apa yang disaksikannya dari realitas masa lampau.

Untuk mengungkapkan makna dan signifikansi dirinya, fakta-fakta dan bukti-bukti sejarah harus menyadarkan dirinya pada kekuatan informasi dari luar ialah peneliti atau sejarawan. Secara metodologis interpretasi merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan proses penelitian sejarah dan penulisan sejarah.²⁵

4. Historiografi

Historiografi menjadi sarana mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian yang diungkap, diuji dan diinterpretasi. Kalau penelitian

²⁴ Anwar Sanusi, *Op.cit.*, hlm, 138-139.

²⁵ A Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015, hlm, 82.

sejarah bertugas merekonstruksi sejarah masa lampau, maka rekonstruksi itu hanya akan menjadi eksis apabila hasil-hasil pendirian tersebut ditulis.

Penulisan sejarah tidak semudah dalam penulisan ilmiah lainnya, tidak cukup menghadirkan informasi dan argumentasi. Penulisan sejarah, walaupun terikat pula oleh aturan-aturan logika dan bukti-bukti empiris, tidak boleh dilupakan bahwa ia adalah juga karya sastra yang menuntut kejelasan struktur dan gaya bahasa, aksentuasi serta nada retorika tertentu.

Karya penulisan penelitian sejarah dapat mengambil beberapa bentuk seperti *paper*, *artikel* atau *buku*, bahkan *buku* yang berjilid-jilid. Masing-masing bentuk memiliki prinsip-prinsip yang berbeda, menuntut komposisi dan gaya bahasa serta jenis-jenis kerja yang berlainan pula. Dalam penulisan ini lebih difokuskan pada prinsip-prinsip umum penulisan sejarah ilmiah pada umumnya.²⁶

Menulis sejarah merupakan suatu kegiatan intelektual dan ini suatu cara yang utama untuk memahami sejarah. Ketika sejarawan memasuki tahap menulis, ia mengerahkan seluruh daya pikirannya, bukan saja keterampilan teknis penggunaan kutipan-kutipan dan catatan-catatan, tetapi yang terutama penggunaan pikiran-pikiran kritis dan analisisnya karena ia pada akhirnya harus menghasilkan suatu sintesis dari seluruh hasil penelitiannya atau penemuannya itu dalam suatu penulisan utuh yang disebut historiografi.²⁷

²⁶ *Ibid*, hlm: 99.

²⁷ Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2016), hlm: 99.

H. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih sistematis, jelas dan terarah, maka dalam penyusunannya akan dibagi beberapa bab dan masing-masing bab memiliki sub-bab.

Bab I Pendahuluan, yang menerangkan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sekaligus sistematika penulisan.

Bab II akan membahas mengenai kondisi lingkungan Kota Cirebon sebelum *gemeente* yang akan diuraikan kedalam dua sub bab yakni struktur Kota Cirebon sebelum abad ke-19 Masehi dan kondisi lingkungan Kota Cirebon abad ke-19 Masehi.

Bab III akan membahas mengenai faktor yang melatarbelakangi kebijakan sanitasi lingkungan yang akan diuraikan kedalam tiga subbab yakni kehidupan masyarakat yang tidak sehat, pencemaran lingkungan dan transformasi Kota Cirebon.

Bab IV akan membahas mengenai penerapan dan implikasi kebijakan pemerintah *Gemeente* Cirebon dalam menangani sanitasi lingkungan yang akan diuraikan dalam dua sub bab yakni penerapan kebijakan pemerintah *gemeente* (kota praja) dalam menangani sanitasi lingkungan, dan implikasi dari kebijakan pemerintah *gemeente* dalam penanganan sanitasi lingkungan.

Bab V berupa penutup pada pembahasan laporan penelitian yang terdiri dari dua subbab yakni simpulan dan saran.